



**BAGIAN PKORB  
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI**

**TRIWULAN 4**

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV Tahun 2024 dengan lancar dan sukses. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan RB dari Triwulan IV Tahun 2024, termasuk capaian program dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan acuan dan *feed back* untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan evaluasi eksternal, serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahap berikutnya.

Kepada Tim RB Tahun 2024, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan IV Tahun 2024. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RB Triwulan IV Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, Desember 2024  
Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2024

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. <sup>ke-</sup>



## A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang tertuang sebagai visi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi.

Upaya percepatan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Oleh karena itu, upaya percepatan perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dengan begitu, upaya percepatan pelaksanaan RB dapat berdampak positif terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan RB, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB di tingkat instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*.

Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa monitoring dan evaluasi RB merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan RB. Kegiatan yang dilaksanakan per triwulan ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan RB yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB Sekretariat Jenderal DPR RI ke depannya.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan IV Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2024 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.



## LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB General berfokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan sasaran *Road Map* RB 2020-2024. Pada tingkatan instansional/level mikro, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan maupun program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini terdiri dari pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General dilakukan atas 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama. Sedangkan RB Tematik terdiri atas 5 (lima) tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

### A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024

#### 1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 162.173.000	Telah terlaksana
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi penyusunan kajian penyederhaan birokrasi telah dilaksanakan dengan berisik alternatif penataan organisasi yang diutamakan untuk pembentukan sekretariat bagi Alat

Kelengkapan Dewan baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa telah ditetapkan penambahan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI, melaksanakan proses penataan organisasi untuk menindaklanjuti amanat/*mandatory* tersebut.

Selanjutnya, untuk rencana aksi penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi juga telah dilaksanakan. Naskah Akademik Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/13164/OT.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, hal: Usulan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian pada rencana aksi penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi, proses diawali dengan pelaksanaan ekspose penataan organisasi di Kementerian PANRB yang dilaksanakan melalui daring pada Jumat, 1 November 2024. Berdasarkan hasil ekspose yang telah dilaksanakan, selanjutnya pihak Kementerian PANRB mengeluarkan surat persetujuan penataan organisasi yang termuat dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/1486/M.KT.01/2024 tanggal 8 November 2024, hal: Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi tersebut, selanjutnya Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah selesainya penyusunan, pada 11 November 2024 ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GAWRYZFawRRatTB>

## 2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	-	3	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan	Laporan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Sistem dan Mekanisme	-	-	1	-	Rp. 49.800.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI						
Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-	-	-	1	Rp. 53.150.000	Telah terlaksana
Implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan implementasi sistem dan mekanisme kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi evaluasi, sosialisasi, implementasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah terlaksana. Evaluasi dilaksanakan dengan koordinasi bersama Bagian Pembentukan Produk Hukum. Kemudian sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi kelembagaan pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 09.000 WIB di Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 2.



Gambar 1.1 Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Selanjutnya, untuk implementasi pelaksanaan Keputusan tentang Sistem dan Mekanisme Kerja ini, maka seluruh unit kerja mengadministrasikan pelaksanaan tugas *squad team* dalam bentuk Keputusan (baik untuk Tim yang mempunyai dampak anggaran/honor maupun yang tidak berdampak anggaran/honor) dan Surat Tugas. Dalam rangka pelaporan pelaksanaan sistem kerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah disampaikan naskah *softcopy* Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan beberapa contoh Keputusan/Surat Tugas yang menjadi gambaran pelaksanaan *squad team* di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berkaitan dengan realisasi anggaran, dengan pagu Rp. 49.800.000, realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan rapat dengan realisasi sebesar Rp. 2.310.000. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi, dengan pagu semula Rp. 53.150.000, dilakukan revisi anggaran, sehingga pagu yang ada menjadi Rp. 113.175.000, realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan rapat dan pembayaran honor narasumber dengan realisasi sebesar Rp. 59.345.000.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C6WQRZXQrpqM93g>

### 3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

#### a. Indeks SPBE

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	2,95	3,57	3,6	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK	Laporan penerapan dan dokumentasi pengelolaan aset TIK yang fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR)	Laporan peningkatan ruang lingkup UPR berdasarkan prioritas risiko SPBE	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK	Tersusunnya kebijakan/pedoman perubahan layanan SPBE dengan fokus	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	pada perubahan layanan TIK yang diterapkan DPR RI						
Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi	Hasil evaluasi utilitas pemanfaatan aplikasi/sistem informasi di DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029	RITIK dan Peta Jalan TIK Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional	1	1	1	1	Rp. 800.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penerapan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah terlaksana dan menunjukkan kemajuan signifikan dengan pengintegrasian aplikasi DigitAll, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 798/SEKJEN/2024 pada 28 Maret 2024. Implementasi aplikasi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan aset TIK, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Sebagai salah satu contoh proses, fitur usulan pengembalian aset kini dapat dilakukan secara digital. Permohonan pengembalian barang yang dikirimkan melalui aplikasi secara otomatis diteruskan ke Bagian Barang Milik Negara (BMN), yang kemudian menindaklanjuti dengan pengambilan aset secara fisik. Sistem ini telah mempercepat proses administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya, progress penting lainnya adalah pembuatan akun operator untuk Pustekinfo di aplikasi DigitAll. Fitur monitoring aset, termasuk inventarisasi opnam fisik, kini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui *platform* ini. Selain itu, aplikasi DigitAll telah diintegrasikan melalui API dengan SIMAN dan SAKTI, dua aplikasi milik Kementerian Keuangan, sehingga memastikan data asset TIK dapat dikelola secara terintegrasi dan terkini. Hal ini memperkuat akurasi data serta meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris.

Kemajuan ini mencerminkan transisi dari sistem manual ke sistem digital berbasis aplikasi, mendukung prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pengelolaan aset TIK menggunakan aplikasi DigitAll, manajemen aset TIK di Sekretariat Jenderal DPR RI telah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, memberikan dasar yang kokoh untuk peningkatan tata kelola aset ke depan. Progress implementasi terus dipantau untuk memastikan optimalisasi penggunaan aplikasi di seluruh siklus manajemen aset.

Kemudian rencana aksi meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR) telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penting. Telah dilakukan rapat



evaluasi lanjutan terkait Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2024. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian panduan yang ada dengan kerangka kerja terkini, khususnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Evaluasi tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian Surat Keputusan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI Sekretariat Jenderal DPR RI agar memuat elemen-elemen kunci dari Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020, seperti gambar Proses Manajemen Risiko, 16 (enam belas) Kategori Risiko, 7 (tujuh) Area Dampak, serta memenuhi standar 5 (lima) Kertas Kerja Generik. Selain itu, form *Risk Register* yang digunakan dalam pengelolaan risiko juga diperbaiki untuk lebih selaras dengan prinsip manajemen risiko yang efektif. Langkah ini diiringi dengan penyusunan draft perubahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1047 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI pada Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat tata kelola risiko di bidang teknologi informasi.



Gambar 1.2 Rapat Penyusunan Draft Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1047 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI pada Sekretariat Jenderal DPR RI

Pada rencana aksi penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029, telah disusun draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang dirancang berdasarkan Standar ISO 20000. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI ini menjadi landasan formal untuk meningkatkan tata kelola layanan TIK yang terstandarisasi dan efisien. Pada bagian lampiran draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut, telah dimasukkan pedoman manajemen perubahan yang berfungsi sebagai panduan dalam mengelola setiap perubahan yang terkait dengan layanan TIK. Pedoman ini mencakup proses identifikasi, evaluasi, persetujuan, dan implementasi perubahan, memastikan bahwa semua perubahan dilakukan secara terkendali dan meminimalkan potensi risiko terhadap layanan. Dengan adanya pedoman ini, pengelolaan perubahan menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Penyusunan draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengadopsi standar global dalam pengelolaan layanan TIK, sekaligus mendukung prinsip SPBE. Implementasi pedoman manajemen perubahan dalam draft Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan teknologi.



Selanjutnya, pada rencana aksi pengukuran utilitas aplikasi/sistem informasi, telah dilakukan penyusunan laporan hasil identifikasi kebermanfaatan aplikasi yang mencakup evaluasi komprehensif terhadap efektivitas dan kontribusi berbagai aplikasi dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Laporan ini disusun berdasarkan analisis data penggunaan aplikasi, umpan balik dari pengguna, serta indikator kebermanfaatan seperti efisiensi proses, peningkatan produktivitas, dan tingkat adopsi aplikasi oleh unit kerja. Penyusunan laporan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang kurang efektif, serta memastikan investasi teknologi informasi memberikan manfaat yang maksimal.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029 pun telah mencapai progress yang signifikan di Triwulan IV. Salah satu capaian utamanya adalah penyusunan dokumen RITIK yang didasarkan pada hasil asesmen menyeluruh terhadap 21 (dua puluh satu) unit kerja Eselon II. Asesmen ini mencakup analisis berbagai aspek strategis, seperti proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan teknologi informasi, yang menjadi landasan dalam menyusun *roadmap* transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini dokumen RITIK sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan di bulan Desember ini.

Selain itu, pada Triwulan IV ini juga telah dilaksanakan *Kickoff Meeting* Penyusunan RITIK 2025-2027 pada tanggal 18 November 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil asesmen yang telah dilakukan, sekaligus memulai diskusi untuk memfinalisasi rancangan dokumen RITIK. *Kickoff meeting* ini dihadiri oleh pejabat Eselon I, yang memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa dokumen RITIK selaras dengan visi organisasi dan mendukung tujuan Pembangunan SPBE.



Gambar 1.3 *Kickoff Meeting* Penyusunan RITIK 2025-2027

Progres ini mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyusun rencana induk yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. RITIK 2025-2027 diharapkan menjadi pedoman strategis yang mendukung pengembangan

layanan digital yang inovatif, aman, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional di seluruh unit kerja.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Di7p54Piew9jb3f>

**b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE**

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	-	1	3	Pusat Teknologi Informasi

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Melakukan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE	Laporan evaluasi dan rekomendasi eksistensi pengaturan arah pemanfaatan Arsitektur SPBE sebagai pedoman keterpaduan/integrasi SPBE	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI	Laporan pembaharuan Arsitektur SPBE As-Is DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Arsitektur SPBE To-Be DPR RI	Laporan penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	-	-	-	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Melakukan <i>gap analysis</i> dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	Laporan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE telah dicapai dalam penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027. Salah satu capaian utamanya adalah penyusunan dokumen RITIK yang didasarkan pada hasil asesmen menyeluruh terhadap 21 (dua puluh satu) unit kerja



Eselon II. Asesmen ini mencakup analisis berbagai aspek strategis, seperti proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan teknologi informasi, yang menjadi landasan dalam menyusun *roadmap* transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini dokumen RITIK sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan di bulan Desember ini.

Selain itu, pada Triwulan IV juga telah dilaksanakan *Kickoff Meeting* Penyusunan RITIK 2025-2027 pada tanggal 18 November 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil asesmen yang telah dilakukan, sekaligus memulai diskusi untuk memfinalisasi rancangan dokumen RITIK. *Kickoff meeting* ini dihadiri oleh pejabat Eselon I, yang memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa dokumen RITIK selaras dengan visi organisasi dan mendukung tujuan pembangunan SPBE.

Progres ini mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyusun rencana induk yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. RITIK 2025-2027 diharapkan menjadi pedoman strategis yang mendukung pengembangan layanan digital yang inovatif, aman, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional di seluruh unit kerja.



Gambar 1.4 *Kickoff Meeting* Penyusunan RITIK 2025-2027

Kemudian Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah menyelesaikan langkah strategis dalam Rencana Aksi Reviu Aktual atas Arsitektur SPBE As-Is. Capaian utama dalam periode ini adalah pemutakhiran data untuk Arsitektur SPBE As-Is pada aplikasi SIA SPBE V2 milik Kementerian PANRB. Pemutakhiran ini mencakup pembaruan data yang menggambarkan kondisi eksisting arsitektur SPBE di lingkungan DPR RI.

Pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai arsitektur SPBE As-Is di DPR RI terkini, akurat, dan relevan. Data tersebut meliputi komponen utama arsitektur, seperti proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi, yang menjadi landasan untuk penyusunan arsitektur To-Be dan perencanaan transformasi SPBE yang lebih efektif.

Perubahan data arsitektur SPBE As-Is yang ada dari data sebelumnya adalah sebagai berikut:

DOMAIN ARSITEKTUR	DATA AS-IS LAMA	DATA AS-IS TERBARU
Proses Bisnis	15	149
Layanan	81	91
Data	308	301
Aplikasi	105	120
Infrastruktur	10	116
Keamanan	7	29

Tabel 1.1 Perubahan Data Arsitektur SPBE As-Is

Pada Triwulan IV Tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah menyelesaikan penyusunan Arsitektur SPBE To-Be sebagai bagian dari rencana aksi untuk mendukung transformasi digital yang terstruktur dan terintegrasi. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan hasil *gap analysis* dari kondisi As-Is dan visi DPR RI untuk pengembangan arsitektur SPBE yang lebih optimal.

Dalam arsitektur To-Be yang disusun, terdapat penambahan dan perubahan pada domain proses bisnis dan domain aplikasi. Pada domain proses bisnis, proses bisnis yang dirancang diharapkan dapat mendukung tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan digitalisasi. Sementara itu, pada domain aplikasi, dilakukan pengembangan aplikasi baru serta optimalisasi aplikasi eksisting untuk memperkuat kapabilitas layanan berbasis teknologi, termasuk integrasi aplikasi lintas fungsi untuk mendukung layanan publik dan internal yang lebih terhubung dan responsif.

Selanjutnya, rencana aksi melakukan *gap analysis* dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE telah terlaksana dengan selesainya penyusunan Peta Rencana SPBE yang diselaraskan dengan hasil *gap analysis* dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Tahun 2025-2027. Peta rencana ini dirancang sebagai panduan strategis untuk mengarahkan implementasi SPBE di DPR RI agar lebih terstruktur dan terintegrasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan nasional. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi arsitektur SPBE As-Is dengan visi dan arsitektur SPBE To-Be yang telah disusun. Analisis ini menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan peta rencana, mencakup prioritas pengembangan di berbagai domain, termasuk proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi. Peta rencana ini juga dirancang agar selaras dengan strategi RITIK 2025-2027, yang berfokus pada penguatan tata kelola teknologi informasi dan akselerasi transformasi digital.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/faSyPFGAsL3JGH2>



4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi:  
a. Indeks Perencanaan Pembangunan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	-	91,88	92	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan	Tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan keselarasan informasi kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	50 %	50 %	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Pelaksanaan sinkronisasi/penyeleraan Rencana Kerja dengan RKAKL TA 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan, pelaksanaan rencana aksi sekurangnya telah terlaksana pada Triwulan I s.d. III. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan IV.

**b. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	67,28	67,46	76	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan Kinerja	Tersusunnya <i>Cascading</i> dan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021	-	1	-	-	Rp. 25.875.000	Telah terlaksana
	Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023	-	1 (50%)	1 (50%)	-	Rp. 25.500.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025	-	-	-	1	Rp. 26.250.000	Tidak terlaksana
	Tersusunnya Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II	26	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Pengukuran Kinerja	Pembangunan aplikasi e-SAKIP	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	Rp. 220.360.000	Telah terlaksana
	<i>Updating</i> data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	26	-	-	-	Rp. 174.258.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Tahun 2024	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SAKIP Internal	-	-	5	-	Rp. 60.984.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP	-	-	-	1	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
	Pemberian <i>reward</i> atas penilaian SAKIP unit kerja	-	-	1	-	Rp. 60.084.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penguatan Perencanaan Kinerja (PK) dengan indikator tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025, pada awalnya ditargetkan akan terealisasi pada tanggal 23 Desember 2024. Namun, berdasarkan hasil diskusi dan arahan Pimpinan, penandatanganan PK akan diundur hingga 8 Januari 2025. Beberapa pertimbangan pengunduran waktu penandatanganan PK tersebut antara lain:

- Belum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun 2025-2029. Penetapan Renstra tersebut penting sebagai acuan dalam pengisian sasaran, indikator, dan target yang akan disepakati di dalam PK tahun 2025;
- Belum disepakati apakah akan mencantumkan sasaran dan indikator kinerja Satker Dewan di dalam PK tahun 2025. Pencantuman ini merupakan konsekuensi dari digabungnya Renstra Dewan dan Renstra Setjen ke dalam satu Renstra sesuai dengan arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Praktik yang berjalan selama ini hanya mencantumkan sasaran, indikator, dan target yang mengacu pada Satker Setjen pada PK;
- Kemungkinan tetap menggunakan formulasi PK seperti yang dipergunakan pada tahun sebelumnya hingga ditetapkannya Renstra baru pada pertengahan tahun 2025. Hanya saja hal ini masih menunggu arahan pimpinan selanjutnya.

Oleh karena itu, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang rencananya akan diselesaikan di Triwulan IV diundur hingga awal Triwulan I Tahun 2025. Oleh karena itu,

alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 26.250.000 tidak terserap pada Triwulan IV.

Kemudian pada rencana aksi penguatan Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengembangan Aplikasi E-SAKIP, dilaporkan bahwa pemanfaatan aplikasi tertentu masih ditunda karena membutuhkan pengembangan lebih lanjut terkait beberapa fitur. Selain kebutuhan pengembangan beberapa fitur penting, hal lain yang masih dihadapi dalam rangka pemanfaatan E-SAKIP secara resmi oleh organisasi adalah belum adanya kerangka regulasi yang komprehensif. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan menyusun pedoman yang menetapkan penggunaan aplikasi ini hingga detail teknis pemanfaatannya. Hingga saat ini, pedoman tersebut tengah dilakukan reviu oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk memastikan pedoman tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain penetapan pedoman, beberapa penambahan fitur juga tengah diupayakan dan telah disampaikan dalam bentuk dokumen proposal pengembangan yang telah disampaikan melalui Surat Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dan Organisasi Nomor 416/PR.01.04/11/2024, hal: Pengajuan Pengembangan Aplikasi E-SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 4 November 2024.

Selain mengajukan proposal, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan koordinasi dengan Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN, serta Bidang Sistem Informasi Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk melakukan sinkronisasi terkait Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Individu. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

- a. Rancangan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang pedoman pengukuran kinerja organisasi dan sistem informasi pendukungnya harus sudah ditetapkan paling lambat pada bulan Maret 2025;
- b. Memformulasikan kembali kebutuhan untuk pengembangan sistem informasi E-SAKIP;
- c. Menambahkan fitur ekspor dokumen berdasarkan informasi kinerja yang telah di-input;
- d. Fokus utama pengembangan pada aspek pengukuran kinerja. Hasil kuantifikasi pengukuran kinerja organisasi tersebut akan menjadi salah satu komponen pemberian tunjangan kinerja dengan bobot 10%;
- e. Memperbaiki tampilan aplikasi agar lebih ramah pengguna;
- f. Penambahan fitur dan penyesuaian lainnya pada rancangan aplikasi E-SAKIP oleh Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi akan diselesaikan pada tanggal 3 Januari 2025.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini rencananya sebesar Rp. 220.360.000 yang dialokasikan untuk pembentukan Tim Pengelolaan SAKIP yang juga melibatkan Pustekinfo dalam pembangunan sistem informasi E-SAKIP. Namun, sebagian alokasi anggaran tersebut terkena optimalisasi dan pengelolaan kegiatan dilakukan secara internal.





Gambar 1.5 Rapat Progres Pengembangan Aplikasi E-SAKIP

Kemudian masih pada rencana aksi yang sama dengan indikator *updating* data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi telah terlaksana. Dalam hal ini, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan beberapa kali asesmen selama tahun 2024 untuk memetakan talenta sehingga dapat diproyeksikan menduduki jabatan target. Berikut data Asesmen Pegawai Tahun 2024:

JABATAN	JUMLAH	WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksana Kelas Jabatan 7	24	April 2024
Pelaksana Kelas Jabatan 6	26	April 2024
Pejabat Fungsional Terampil	23	Mei dan Juni 2024
Pejabat Fungsional Ahli Muda	70	Mei dan Juni 2024
Pejabat Fungsional Ahli Madya	83	Mei, Juni dan Juli 2024
Pejabat Fungsional Ahli Pertama	50	Juni 2024
Pejabat Administrator	14	Juni dan Juli 2024
Pejabat Pengawas	25	Juni dan Juli 2024

Tabel 1.2 Data Asesmen Pegawai Tahun 2024

Dari data di atas terlihat bahwa asesmen terakhir dilakukan pada bulan Juli 2024. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keterbatasan anggaran; dan
- Banyak pegawai yang telah melakukan asesmen pada tahun sebelumnya dan belum melewati 2 (dua) tahun masa berlaku hasil asesmen sehingga belum memerlukan asesmen kembali.

Data asesmen yang telah dilakukan kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMATA untuk kemudian menjadi rujukan pimpinan dalam promosi dan rotasi.

Selanjutnya pada rencana aksi penguatan Pengukuran Kinerja dengan indikator tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja telah terlaksana melalui Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 4-7 Juli 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk menjamin proses penganggaran disusun berbasis kinerja, berkualitas dan akuntabel. Rapat tersebut juga bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

Beberapa catatan yang menjadi kesimpulan rapat tersebut antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran yang tidak optimal dilaksanakan;

- Memutakhirkan kembali Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada semester II, agar dapat meminimalisir pelaksanaan revisi;
- Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan utama tugas dan fungsi, dan mengurangi pelaksanaan kegiatan pendukung;
- Mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta mempercepat pelaksanaan pertanggungjawabannya;
- Mengevaluasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan agar sesuai dengan akun belanjanya. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kesalahan pembebanan akun belanja.



Gambar 1.6 Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2024

Pada rencana aksi penguatan Pelaporan Kinerja dengan indikator tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Tahun 2024 telah terlaksana. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) untuk pengukuran kinerja unit kerja yang diatur melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1459/SEKJEN/2024. Pengembangan dan pemanfaatan metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi rujukan evaluasi setiap semester/per 6 (enam) bulan.

Evaluasi capaian kinerja triwulanan ini baru dimulai pada akhir Triwulan II Tahun 2024 dan hingga akhir Triwulan IV masih konsisten dilakukan. Hanya saja kelemahan mendasar dari metode ini adalah ketidakkonsistenan realisasi dengan target rencana aksi yang telah dilakukan pada awal tahun. Beberapa formulir realisasi yang diisi oleh unit kerja tidak sesuai dengan rencana awal sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengukuran yang jelas dan dapat dikuantifikasi. Kolom "target" awal juga tidak tersedia pada formulir, sehingga sulit melakukan *tracking* atas capaian unit kerja dimana banyak realisasi muncul begitu saja tanpa penjelasan berdasarkan rencana awal.

Penambahan lainnya pada metode pengukuran ini adalah dengan melengkapi komponen pengukuran dengan fitur dialog kinerja. Hal ini bertujuan agar seluruh proses pencapaian



kinerja baik triwulanan dan tahunan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, terutama antara Pimpinan dan Unit Kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hingga penyusunan laporan ini belum disepakati dan ditetapkan mengenai format yang akan dipergunakan mengenai bagaimana mengukur capaian kinerja organisasi sebagaimana telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dijelaskan di atas, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan revisi atas Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1459/SEKJEN/2024 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja agar sesuai dengan perkembangan internal, maupun rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengukuran Kinerja yang tengah disusun. Revisi yang dilakukan atas Keputusan tersebut adalah mengakomodir 2 (dua) jenis pengukuran sebagaimana telah dijelaskan dengan perbaikan pada beberapa detail teknis agar lebih konsisten dengan kebutuhan organisasi atas pengukuran kinerja yang dapat diandalkan.

Kemudian pada rencana aksi yang sama dengan indikator tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP juga telah terlaksana. Mengacu pada hasil evaluasi SAKIP unit kerja Eselon I, walaupun telah mendapatkan predikat akuntabilitas kinerja “BB”, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Inspektorat Utama selaku evaluator internal memberikan beberapa rekomendasi penting antara lain:

- Menyesuaikan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Sekretariat Jenderal DPR RI setiap bulannya;
- Membangun dan menggunakan aplikasi dalam melakukan evaluasi SAKIP.

Dalam hal ini, Biro Perencanaan dan Organisasi menindaklanjuti beberapa rekomendasi penting tersebut, antara lain:

- Tengah mengkaji apakah akan menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal baru tentang SAKIP Sekretariat Jenderal yang akan menggantikan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 yang dirasa sudah tidak relevan;
- Menindaklanjuti rekomendasi monitoring dan evaluasi bulanan dengan melakukan monitoring dan evaluasi per-triwulan. Hal ini merupakan solusi paling realistis karena sumber daya internal yang tersedia tidak memungkinkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
- Menindaklanjuti rekomendasi pengembangan E-SAKIP dengan menyusun kerangka regulasi yang relevan dengan kebutuhan dan kesiapan organisasi. Infrastruktur sistem informasi juga tengah dikembangkan dengan berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DddmPkH7RCiKdiG>

5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4 unit	5 unit	6 unit	Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Laporan Pendampingan ZI	4	4	-	-	Rp. 17.880.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit ZI	-	6	-	-	Rp. 5.965.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Survei Penilaian Persepsi Korupsi dan Survei Penilaian Kualitas Pelayanan	Laporan survei	-	6	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021	Dokumen persyaratan pengajuan unit ZI	-	-	1	-	Rp. 5.965.000	Telah terlaksana
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat pengajuan unit kerja menuju WBK	-	-	1	-	Rp. 26.028.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Proses evaluasi oleh TPN	Lembar Hasil Evaluasi Kementerian PANRB	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Hasil konfirmasi progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi proses evaluasi oleh TPN dengan indikator Lembar Hasil Evaluasi Kementerian PANRB telah terlaksana. Surat Tanggapan dari Kementerian PANRB terkait Hasil Konfirmasi Progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2024. Selanjutnya, pada rencana aksi yang sama dengan indikator hasil konfirmasi progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI pun telah terlaksana dengan diterimanya Lembar Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dari Kementerian PANRB pada tanggal 5 Desember 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BNtZAEJAPZdr9TT>

#### 6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPKP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,28)	Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi SPIP	-	-	2	-	Rp. 56.304.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya	Tersusunnya Monitoring dan Evaluasi Dokumen Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan <i>cascading</i> kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i>	Dokumen <i>cascading</i> kinerja	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik	Laporan Monitoring Penanganan Risiko	-	-	-	1	Rp. 66.765.000	Telah terlaksana
Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan	Laporan atas pemantauan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK	-	-	1	-	Rp. 21.945.000	Telah terlaksana

Rencana aksi analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik telah terlaksana sebagaimana terdapat pada Laporan Monitoring Penanganan Risiko Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/kKTSX7iHd7yqzGL>



7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	100%	2	4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembangunan aplikasi/dashboard pengaduan berbasis AI	Aplikasi/dashboard pengaduan berbasis AI	-	-	1	-	Rp. 498.500.000	Telah terlaksana
Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI	Unggahan konten media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI ke sosial media Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh anggota DPR RI	Video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan terintegrasinya Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2	-	-	-	Rp. 204.400.000	Telah terlaksana
Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	1	1	2	-	Rp. 232.534.960	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Peningkatan Kualitas Tugas Dan Fungsi Pengawasan DPR RI	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	1	-	1	-	Rp. 201.200.000	Telah terlaksana
Bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	-	-	-	1	Rp. 17.700.000	Telah terlaksana

Rencana aksi bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat telah terlaksana dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat penghubung pengaduan masyarakat DPR RI tentang aplikasi pengaduan masyarakat yang dikelola di DPR RI, khususnya karena terdapat pejabat penghubung yang baru dipindahkan ke unit kerja yang baru. Kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2024.



Gambar 1.7 Sertifikat Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya, rencana aksi publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI telah terlaksana pada bulan Desember 2024 melalui Instagram Biro Hukum dan Dumas. Dalam postingan yang diunggah, dijelaskan mengenai Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI sebagai bentuk sosialisasi standar pelayanan dan mekanisme pengaduan masyarakat di DPR RI.





Gambar 1.8 Unggahan Sosial Media tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI

Dalam hal anggaran, terdapat penyesuaian anggaran dikarenakan kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang pada awalnya direncanakan sejumlah Rp. 17.700.000 menjadi Rp. 17.250.000. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa peserta yang telah direncanakan untuk ikut berpartisipasi, namun tidak dapat hadir. Sedangkan anggaran untuk kegiatan publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI digunakan sesuai anggaran yang telah direncanakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/5nZk7x4JMSoTnqL>

8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,43	59,7	78,9	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP	Dokumen rekapitulasi minimal 70% dari total nilai pengadaan telah diinput dalam Aplikasi SIRUP	1	-	-	-	Rp. 347.942.745	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait <i>e-purchasing</i> dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 510.232.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi <i>probity audit</i>	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 171.695.850	Telah terlaksana
Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK dengan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penginputan data Pengadaan	Persentase peserta yang hadir dalam bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	1	-	Rp. 302.412.255	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Barang/Jasa (PBJ) di Aplikasi SIRUP							
Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase vendor/penyedia yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	1	-	Rp. 115.895.000	Telah terlaksana
Menyusun rencana aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	Rencana aksi terkait evaluasi Sistem Merit yang telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Biro SDMA	-	1	-	-	Rp. 333.159.040	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil evaluasi Sistem Merit	Minimal 50% dari total rekomendasi telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi Sistem Merit	-	1	-	-	Rp. 6.900.000	Telah terlaksana
Melakukan sosialisasi terhadap Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 320.452.950	Telah terlaksana
Melaksanakan <i>workshop</i> tentang disiplin pegawai	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan <i>workshop</i> berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 186.000.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2021	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 171.695.850	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menandatangani Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi	Minimal 50% dari total calon pimpinan/pejabat instansi telah menandatangani Pakta Integritas sebelum memangku jabatannya	-	-	-	1	Rp. 38.955.000	Telah terlaksana
Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Minimal 50% dari kasus benturan kepentingan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.432.750	Telah terlaksana
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Minimal 50% dari kasus suap/gratifikasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	Minimal 50% dari total Tim UPG telah mengikuti <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	-	-	1 (15 %)	1 (50 % kumulatif)	Rp. 5.500.000	Telah terlaksana
Melakukan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan	Surat Himbauan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim	-	-	1	-	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 251.785.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penandatanganan Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi telah terlaksana. Rencana aksi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Sekretariat Jenderal DPR RI yang menetapkan bahwa setiap pejabat yang akan dilakukan pengangkatan jabatan, akan diukur beberapa aspek salah satunya adalah integritas.

Selanjutnya, rencana aksi evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah terlaksana. Berdasarkan laporan yang telah disusun, tidak terdapat pengaduan atas benturan kepentingan, baik pelaporan secara langsung maupun melalui *Whistle Blowing System* (WBS), sehingga tidak ada kasus yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Kemudian rencana aksi pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi juga telah terlaksana. Kegiatan monitoring dan evaluasi gratifikasi akan dilaksanakan setiap semester oleh Bagian Administrasi Inspektorat Utama. Untuk Semester II, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi gratifikasi pada bulan Desember 2024. Kegiatan monitoring dan evaluasi gratifikasi ini pun telah disusun ke dalam dokumen Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2024.

Rencana aksi mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan *e-Learning* KPK terkait Antikorupsi dan Integritas telah dilaksanakan melalui *e-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) yang dilaksanakan untuk Tim UPG pada tanggal 7-9 Oktober 2024 dengan persentase ketercapaian sebesar 51,22% (21 orang dari Tim UPG telah memperoleh sertifikat *e-learning* PPG dari total 41 orang Tim UPG), dengan rincian:

1. 19,51% dari Tim UPG mengikuti Pelatihan *e-learning* KPK (8 dari 41 orang Tim UPG);
2. 39,39% dari Tim UPG mengikuti Pelatihan *e-learning* KPK (13 dari 33 orang Tim UPG).

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/28jAkekazTB3CyT>

9. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	-	98,80	99	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
<b>Variabel I:</b> 1. Membuat surat ke Kemenkumham mengenai indikator penilaian	Surat pernyataan mengenai indikator penilaian ke Kemenkumham mengenai indikator kinerja	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Melakukan harmonisasi RUU	Data Harmonisasi RUU	1	1	1	-	RP. 0	Telah terlaksana
<b>Variabel II:</b> 1. Menyusun TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/ Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	TOR Pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/ Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekkuinbang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
2. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Telah terlaksana
	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekkuinbang	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
<b>Variabel III:</b> 1. Menyusun Surat Keputusan dan Surat Tugas kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	1. Surat Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	2. Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
2. Menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	1. Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	2. Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	7	7	6	4	Rp. 349.412.000	Telah terlaksana
3. Mengirim rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
4. Menyusun dokumen rekap data pejabat fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi Undang-Undang	Undangan Legislatif						
<b>Variabel IV:</b> 1. Melakukan pengumpulan Data Dukung Kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Melaksanakan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i> )	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	1	-	-	-	Rp. 93.240.000	Telah terlaksana
3. Melaksanakan Pelaporan Pengembangan JDIH melalui <i>e-Report</i>	<i>Screenshot</i> bukti pengisian <i>e-Report</i>	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
4. Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke <i>Website</i> JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di <i>website</i> JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
5. Mengumpulkan <i>Capture</i> Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	<i>Screenshot Dashboard</i> Portal JDIH	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
6. Menunggah aktivitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	Screenshot bukti upload di media sosial	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
7. Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah di unggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi penyusunan TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan indikator TOR pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham dan rencana aksi pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan indikator terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar) pada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Polhukham telah terlaksana. Rencana aksi dilaksanakan dalam bentuk FGD Diskusi Pakar dengan tema "Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana" yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2024. Diskusi ini direncanakan untuk dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, namun Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham merealisasikan dengan melaksanakannya sebanyak 2 (dua) kali dengan *stakeholder* yang berbeda.

Pada rencana aksi yang sama, Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekkuinbang juga telah menyelenggarakan serta mengikuti lokakarya dalam rangka penyusunan Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2024.

Kemudian pada rencana aksi penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang dengan indikator dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi, dan indikator dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi juga telah terlaksana. Dalam hal ini, terdapat 1 (satu) dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi, dan 4 (empat) dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.



Bersamaan dengan itu, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang juga telah melaksanakan rencana aksi untuk mengirim rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang. Terdapat 1 (satu) dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang.

Selanjutnya, rencana aksi pelaporan pengembangan JDIH melalui *e-Report*, pembuatan Abstrak Peraturan yang diunggah ke *Website* JDIH, pengunggahan aktifitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram), dan penyusunan Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH telah terlaksana seluruhnya oleh Biro Hukum.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/9pQo7RP4ALJwpEF>

#### 10. Pelaksanaan Arsip Digital: Tingkat Digitalisasi Arsip

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
ANRI	77,99	98,38	98,38	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mini DV	Terpeliharanya Arsip Mini DV	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	-	1	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>	Terpeliharanya <i>Mobile File</i>	-	-	1	-	Rp. 134.800.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	-	1	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Potong	Terpeliharanya Mesin Potong	-	-	-	1	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari Penyimpanan	-	1	-	-	Rp. 90.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Arsip Kaset						
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Workshop/Bimbingan teknis/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)	Terselenggaranya kegiatan Workshop/Bimbingan teknis/Seminar/Focus Group Discussion	3	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Persidangan	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Barang/Jasa	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, rencana aksi pemeliharaan mesin potong, sewa ruang arsip satu, sewa ruang arsip dua, dan *workshop/bimbingan teknis/seminar/Focus Group Discussion* (FGD) telah terlaksana. Pada saat bersamaan, telah dilakukan penyusutan arsip DPR yang meliputi penyerahan arsip statis ke ANRI yang telah terlaksana pada tanggal 18 November 2024, dan pemusnahan arsip DPR yang telah disetujui pada tanggal 15 November 2024 melalui Surat Arsip Nasional No. B-KN.00.01/392/2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DriS9WKQmiQM7n9>



#### 11. Pelaksanaan Data Statistik Sektor: Indeks Pembangunan Statistik

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	-	1,51	2,6	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi	Data statistik sektoral yang dinilai telah sesuai dengan Standar Data Statistik Nasional dan Data Induk/Kode Referensi	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Terdokumentasinya setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral	Disahkannya prosedur pengelolaan data statistik sektoral	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang statistik sektoral yang diselenggarakan BPS	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR	Terlaksananya bimbingan teknis dengan Produsen Data dalam penggunaan Portal Satu Data DPR	-	1	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Setiap kegiatan statistik sektoral yang dinilai telah dilaporkan ke BPS	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	untuk mendapatkan rekomendasi						

Pada indikator Indeks Pembangunan Statistik, pelaksanaan rencana aksi seluruhnya telah terlaksana pada Triwulan I dan II. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan IV.

## 12. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
LKPP	9,9	47,18	72	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat surat edaran kepada para PPK untuk melakukan Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada aplikasi SPSE	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1484/TL.04/1/204	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024 dan Penyelesaian Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada aplikasi SPSE 4.5	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi Penginputan RUP di Lingkungan Biro Umum	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Koordinasi Persiapan Evaluasi Penggunaan PDN dan UMK-Kop	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Evaluasi Penginputan RUP dan Persiapan Pelaksanaan Penginputan RUP TA 2024 ke Aplikasi SIRUP	Pointer, Rekapitulasi Progress RUP Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Pemilihan Penyedia	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi persiapan Pengumuman Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 bersama dengan Deputi Administrasi dan Deputi Persidangan serta Pejabat Tinggi Pratama	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 25.758.745	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan <i>Parliamentary Meeting on The Occasion Of the 10th World Water Forum</i>	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi Penginputan RUP dengan Para PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Finalisasi penginputan UP Tahun 2024 tanggal 6-7 Maret 2024 dengan mengundang para PPK dan PP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Bidang Administasi dan Narasumber dari LKPP	Undangan Rapat, Rekapitulasi Progress RUP dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 115.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat Klarifikasi atas Pagu Pengadaan yang harus diumumkan pada aplikasi SIRUP kepada LKPP	Surat Klarifikasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP sehingga terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui Katalog Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 20.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan pengisian E-Kontrak, E-Purchasing, E-Tendering, dan Non E-Tendering / Non E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 pada bulan Januari 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Monitoring Proses Metode E-Purchasing sampai dengan tahapan selesai	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis E-Purchasing kepada Para PPK	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 277.184.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis Tata Cara Perhitungan PDN dan TKDN dalam	Surat Tugas, Pointer dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 277.184.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Praktik Pengadaan Barang/Jasa							
Pendampingan untuk para PPK dan PP agar melakukan Pencatatan pada Aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i>	Undangan FGD, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring pencatatan pada aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i> dan menginfokan para PPK dan PP untuk menyelesaikan proses pencatatannya	Undangan, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan <i>Tender</i> dari unit-unit kerja yang didampingi oleh JF PBJ dilakukan sampai dengan proses <i>Tender</i> selesai	<i>Screenshot</i> daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dari web <a href="http://ipse.dpr.ri">ipse.dpr.ri</a>	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Mengingatkan kepada para PPK agar ada minimal 1 (satu) kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian melalui katalog Bela Negara/Toko Daring	Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PP melakukan proses <i>Tender</i> dilanjutkan dengan	Laporan singkat dan Foto kegiatan	1	-	-	-	Rp. 9.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
penyelesaiannya pada aplikasi E-Kontrak							
Pendampingan kepada para PPK untuk penyelesaian E-Kontrak sampai dengan selesai	Undangan Narasumber dan Paparan Materi	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Pencetakan Produk Elektronik Penerbitan	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Produk Sarana Umum YANKES	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi RUP sesuai Revisi Anggaran dan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas Undangan Biro Persidangan I	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas Undangan Biro Kesekretariatan Pimpinan	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Purchasing Triwulan II	Undangan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Singkat, dan Foto	-	-	1	-	Rp. 37.955.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Kegiatan						
Rapat Koordinasi Internal terkait pembahasan Strategi Aplikasi SIRUP, E-Tendering dan E-Purchasing	Foto kegiatan dan laporan singkat	-	-	1	-	Rp. 2.625.000	Telah terlaksana
Rapat Koordinasi Paket Pengadaan Belanja Bahan yang akan diumumkan di Aplikasi SIRUP Tahun Anggaran 2024	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Telah terlaksana
Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SPSE pada tanggal 19-21 Agustus 2024 di Hotel Santika	Nota Dinas, Kerangka Acuan Kegiatan, Surat Tugas, dan foto kegiatan	-	-	1	-	Rp. 16.290.000	Telah terlaksana
Knowledge Sharing Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 28-30 Agustus 2024	Nota Dinas, Kerangka Acuan Kegiatan, Surat Tugas, dan foto kegiatan	-	-	1	-	Rp. 33.503.000	Telah terlaksana
Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Metode E-Purchasing dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan mengundang Narasumber dari LKPP, mengundang Narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Para Auditor, PPK dan Pejabat	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengadaan di Ruang Rapat Abdul Muis							
Bimbingan Teknis Strategi Pelaksanaan E-Katalog dan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 5-7 September 2024 di Bandung	Sertifikat dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 140.400.000	Telah terlaksana
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP terkait Proses Penilaian Penyedia Barang/Jasa Layanan Keprotokolan Bandara	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Persiapan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI untuk Rapat Koordinasi dengan KPA	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 5.390.000	Telah terlaksana
Rapat dengan PPK Bidang Protokol Humas dan PPK Bidang SDM Aparatur dengan mengundang Narasumber dari LKPP terkait Transisi E-Katalog dari versi 5.0 ke versi 6.0	Undangan Rapat, Undangan Narasumber, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 4.235.000	Telah terlaksana
Rapat dengan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI dengan mengundang Narasumber dari LKPP terkait Penyusunan Kertas Kerja RUP Tahun 2025	Undangan Rapat, Undangan Narasumber, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 4.620.000	Telah terlaksana
Rapat dengan PPK Bidang Umum dan Tim Teknis pencatatan RUP	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 2.695.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
pada Aplikasi SPSE 4.5 lingkup Satker Biro Umum							
Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Tendering dan Non-Purchasing sampai dengan Triwulan III	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 31.185.000	Telah terlaksana
Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024	Surat Tugas dan Foto Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penginputan RUP Tahun 2025 pada aplikasi SIRUP	Undangan Narasumber, Undangan Peserta, dan Surat Tugas	-	-	-	1	Rp. 119.361.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun 2024	Undangan Narasumber dan Undangan Peserta	-	-	-	1	Rp. 195.578.000	Telah terlaksana
FGD Tindak Lanjut Pemenuhan JF	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
FGD strategi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan Pendampingan Pengisian Si-Renaksi LKPP dengan mengundang narasumber dari LKPP	Undangan, Nota Dinas dan foto kegiatan	1	-	-	-	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat perihal usulan pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain	Surat Keterangan B/178/KP.05.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Surat Tugas dan Sertifikat	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengadaan Barang/Jasa							
Koordinasi dalam rangka Pemenuhan JF	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
FGD dalam rangka tindak lanjut pemenuhan kebutuhan JF dan Pengelolaan SDM	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemenuhan JF	Nota Dinas	-	1	-	-	Rp. 2.090.000	Telah terlaksana
Rapat koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Rekomendasi Kebutuhan JF PBJ ke Kementerian PANRB	Undangan Rapat, Bahan Rapat, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 4.125.000	Telah terlaksana
Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ)	Surat Rekomendasi dari LKPP	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat secara virtual dengan Narasumber LKPP, Kepala Biro SDM Aparatur dan para calon Pejabat Fungsional untuk membahas Tata Cara Uji Kompetensi JF PBJ	Undangan Rapat, Notulen Rapat, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 5.700.000	Telah terlaksana
Pemberitahuan tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Surat Edaran dari LKPP Nomor 27791/D.1.1/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemberitahuan tentang Percepatan Pengelolaan SDM PBJ untuk ditunjuk sebagai	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: B/331/TI.04/10/2	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pejabat Pengadaan dan PPK	024						
Percepatan Penerapan 17 Standard LPSE	Undangan dan Materi Bimbingan Teknis	-	1	-	-	Rp. 141.00.000	Telah terlaksana
<i>Knowledge sharing</i> tentang Peningkatan Maturitas UKPBJ di Kabupaten Pandeglang	Nota Dinas, Kerangka Acuan Kegiatan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan	-	-	1	-	Rp. 30.540.000	Telah terlaksana
Pemberitahuan tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Surat Edaran dari LKPP Nomor 27791/D.3.1/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, seluruh rencana aksi indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan telah terlaksana seluruhnya. Rencana aksi tersebut meliputi FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP terkait Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Layanan Keprotokolan Bandara, Rapat Persiapan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI untuk Rapat Koordinasi dengan KPA, Rapat dengan PPK Bidang Protokol Humas dan PPK Bidang SDM Aparatur dengan mengundang narasumber dari LKPP terkait Transisi E-Katalog dari Versi 5.0 ke Versi 6.0, Rapat dengan PPK Satker Dewan dan PPK Satker Setjen DPR RI dengan mengundang narasumber dari LKPP terkait Penyusunan Kertas Kerja RUP Tahun 2025, Rapat dengan PPK Bidang Umum dan Tim Teknis pencatatan RUP pada Aplikasi SPSE 4.5 lingkup Satker Biro Umum, Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing sampai dengan Triwulan III, Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024, Penginputan RUP Tahun 2025 pada aplikasi SIRUP, dan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun 2024.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi pemberitahuan tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ telah terlaksana yang diperoleh melalui Surat dari LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Kemudian rencana aksi pemberitahuan tentang Percepatan Pengelolaan SDM PBJ untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan dan PPK juga telah terlaksana. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, rencana aksi pemberitahuan tentang Nilai ITKP Sementara untuk Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ pun telah terlaksana yang diperoleh melalui Surat dari LKPP Nomor 4 Tahun 2021.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/NLPoKYtYDwoC8wG>

13. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:  
a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	93,66	94,26	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA	Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan fitur Rencana Penarikan Dana	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 79.320.000	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 90.792.000	Telah terlaksana
	Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan	1	-	-	1	Rp. 662.762.350	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai dan Rencana Kegiatan IKPA	2	-	-	-	Rp. 9.762.450	Telah terlaksana

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), hanya terdapat satu kegiatan yang ditargetkan pada Triwulan IV, yaitu Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diawali dengan pemaparan capaian nilai IKPA pada Satker Setjen dan Satker Dewan periode Semester I 2024. Pemberian penghargaan kemudian diberikan kepada 6 (enam) unit kerja dengan nilai tertinggi dengan masing-masing 3 (tiga) untuk Satker Setjen dan 3 (tiga) untuk Satker Dewan.

Pada Satker Setjen, Peringkat 1 diraih oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Peringkat 2 diraih oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, dan Peringkat 3 diraih oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Sedangkan pada Satker Dewan, Peringkat 1 diraih oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan, Peringkat 2 diraih oleh Biro Persidangan I, dan Peringkat 3 diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 1.9 Evaluasi IKPA Semester I Tahun 2024

Selama Triwulan IV Tahun 2024, Biro Keuangan juga telah melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka memenuhi target Capaian Nilai IKPA, diantaranya:

1. Melaksanakan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah disahkan dengan nomor dokumen SOP OT.03.03.-0320 Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan
2. Melaksanakan pembaharuan jenis laporan capaian Nilai IKPA kepada seluruh unit kerja yang dibagikan setiap bulan. Pembaharuan jenis laporan ini berupa *Executive Summary* yang dapat diakses oleh seluruh Pejabat Eselon II dan III menggunakan Aplikasi DigitAll dimana pembaharuan ini adalah wujud respon cepat Biro Keuangan dalam menindaklanjuti saran dari unit kerja yang merasa jenis laporan sebelumnya sulit untuk dipahami, sehingga jenis laporan yang baru disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang di dalamnya telah memuat penjelasan dan analisis untuk tiap indikator di IKPA.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/KqP9kn6nxXkaaLd>

**b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)**

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,60	3,6	3,7	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	Jumlah dokumen monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	1	1	1	1	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
Monitoring realisasi PNPB khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN	Jumlah dokumen monitoring capaian PNPB pengelolaan BMN	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN	1	1	1	1	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala	Jumlah laporan penghapusan per semester	-	1	-	1	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP	Jumlah Laporan PSP Tanah dan/atau Gedung Bangunan	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, Biro Keuangan selaku Penanggungjawab IPA telah melaksanakan seluruh rencana aksi. Kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP telah terlaksana pada bulan Oktober 2024. Selanjutnya, monitoring realisasi PNPB khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN telah terlaksana yang juga dilaporkan kepada pihak DJA melalui aplikasi SIMAWAS. Kemudian monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendali juga telah terlaksana dengan memastikan bahwa terkait persetujuan baik oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang telah ditindaklanjuti pengelolaannya pada Pengguna Barang melalui mekanisme perjanjian sewa, penjualan lelang dan Surat Keputusan Penghapusan.

Biro Keuangan juga telah melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala melalui Bagian Administrasi BMN yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1. Terakhir, monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP pun telah terlaksana pada Triwulan IV 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sGbA9Qwyd4MjPbi>

### c. Opini BPK

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh	1	-	-	-	Rp. 66.424.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	unit kerja pemegang akun signifikan						
	Sosialisasi dan Bimbingan teknis Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal	1	-	-	-	Rp. 208.137.330	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	1	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi rekonsiliasi internal aset dan persediaan tiap bulan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Administrasi BMN untuk Periode Triwulan III 2024. Rekonsiliasi dilakukukan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.





Gambar 1.10 Pelaksanaan Konsinyering Rekonsiliasi Internal Triwulan III 2024

Selanjutnya, untuk rencana aksi rekonsiliasi eksternal belanja dan pendapatan tiap bulan telah dilaksanakan oleh Penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan KPPN Jakarta 7 untuk periode September 2024. Rekonsiliasi periode Juni dilakukan bersamaan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.

Di samping rencana aksi yang telah ditetapkan, Biro Keuangan selaku Penanggungjawab Indikator opinik BPK juga telah melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, salah satunya adalah Perjalanan Dinas dalam rangka Penilaian PIPK di Wisma DPR RI. Perjalanan dinas dilakukan pada Bulan Desember ke Wisma Griya Sabha DPR RI, Kabupaten Bogor. Simulasi tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penerapan PIPK di Bagian Pengelolaan Wisma terutama dalam pengadaan belanja pemeliharaan tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.



Gambar 1.11 Pelaksanaan Penilaian PIPK di Wisma Griya Sabha DPR RI

Selain itu, Biro Keuangan juga melaksanakan penelaahan tagihan belanja pemeliharaan. Hal ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan DPR RI TA 2023 dan laporan hasil penilaian PIPK DPR RI TA 2023 dimana masih terdapat temuan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan. Untuk itu, melalui Surat Pemberitahuan Kepala Bagian Administrasi Keuangan No. B/1890/KU.02/8/2024, seluruh kegiatan belanja pemeliharaan yang dilakukan penagihan ke Bagian Administrasi Keuangan, yang selama ini langsung diserahkan ke verifikatur mulai tanggal 1 Agustus 2024 harus diverifikasi terlebih dahulu oleh penyusun laporan keuangan sebelum diserahkan ke verifikatur untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian penggunaan akun belanja.

Banyaknya pengadaan barang yang seharusnya menggunakan belanja modal namun digunakan sebagai belanja pemeliharaan tentunya mengurangi kesempatan negara untuk mengakui barang pengadaan tersebut sebagai harta negara. Sehingga verifikasi tersebut merupakan bentuk penelaahan lebih lanjut mengenai ketepatan penggunaan akun belanja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/S3HSH8PCR9aYzfb>

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPK	86,75%	94,44%	95%	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	Terlaksananya entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	1	-	-	-	Rp. 12.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 56.825.000	Telah terlaksana
	Tersedianya Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Rencana Aksi Konsep LHP BPK	Tersedianya Rencana Aksi Konsep LHP BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 (enam puluh) hari temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersedianya Rencana Aksi 60 (enam puluh) hari	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	Rapat Koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 7.087.350	Telah terlaksana
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	1	-	-	Rp. 7.087.350	Telah terlaksana
Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	Rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan TLHPKN Tim	Tersedianya SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Benchmarking	Tersedianya Laporan Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 109.983.000	Telah terlaksana

Rencana aksi pemantauan TLHP BPK Semester II 2024 yang memiliki beberapa indikator, yaitu rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK, tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024, dan rapat koordinasi dengan BPK RI telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama selaku Penanggungjawab Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

Rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 8 November 2024 bersama unit kerja yang belum menyelesaikan temuan BPK, yakni Biro Keuangan, Biro PBW, dan Biro Umum. Sebelum melakukan pemantauan, Inspektorat Utama mengirimkan Nota Dinas kepada masing-masing unit kerja yang berisi data temuan dan rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti oleh auditi. Selanjutnya, rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah dilakukan oleh auditi beserta kesesuaian eviden data dukung. Hasil tindak lanjut dan eviden data dukung kemudian dituangkan ke dalam Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024.



Gambar 1.12 Rapat Pemantauan TLHP BPK

Kemudian tindak lanjut rekomendasi BPK beserta eviden data dukung diserahkan oleh auditi kepada Inspektorat Utama dalam bentuk *softcopy* melalui *link* Google Drive yang telah ditentukan. Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama melakukan telaah atas kesesuaian tindak lanjut rekomendasi dan eviden yang diberikan oleh auditi untuk selanjutnya di input ke dalam Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024. Matriks Pemantauan TLHP BPK merupakan dasar dalam penyusunan Risalah Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Risalah dan eviden data dukung diserahkan dalam bentuk *softcopy* kepada BPK RI melalui Google Drive. Selain itu, Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama mengisi data tindak lanjut rekomendasi dan mengunggah eviden data dukung ke dalam aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) BPK RI.

Terkait koordinasi pemantauan TLHP dengan BPK RI, dilakukan secara digital melalui Whatsapp dan aplikasi SIPTL. Selanjutnya, pada minggu kedua Desember 2024, BPK RI telah melakukan *entry meeting* dengan Inspektorat Utama untuk membahas hasil dari pemantauan tersebut. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data telah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 29 November s.d. 12 Desember 2024 sesuai dengan Surat dari BPK RI No. 01/PTLRHP/DPR/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan semester sebelumnya, diketahui terdapat 30 (tiga puluh) rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. Pada pemantauan TLHP Semester II 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Inspektorat Utama telah melakukan tindak lanjut atas 25 (dua puluh lima) rekomendasi dan 5 (lima) rekomendasi diusulkan alih status menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Untuk hasil/persentase dari penyelesaian tindak lanjut tersebut belum diketahui dikarenakan masih dalam proses telaah oleh BPK RI dan hasilnya akan diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I 2025.



Bersamaan dengan itu, dalam rangka penyelesaian kerugian negara, Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait pada tanggal 14 Oktober 2024. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas kasus kerugian negara yang belum ditetapkan nilai kerugian dan kasus yang telah dilakukan penetapan namun belum menyelesaikan pembayaran.



Gambar 1.13 Rapat Koordinasi Penyelesaian Kerugian Negara

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rJogc7ADYerxyna>

#### 14. Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KASN	345,5	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengelolaan Aplikasi SiMata	Laporan pengelolaan aplikasi SiMata	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 JP	Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan	1	1	1	1	Rp. 10.004.738.000	Telah terlaksana
Evaluasi berkala penerapan sistem merit	Laporan penerapan sistem merit per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Seluruh rencana aksi dalam Indeks Sistem Merit pada Triwulan IV telah terlaksana. Pada rencana aksi pemenuhan 20 (dua puluh) JP pelatihan bagi setiap pegawai, dapat disampaikan bahwa capaian penyelenggaraan pengembangan kompetensi periode Januari s.d. 19 November 2024 adalah sebagai berikut:

- Dari jumlah total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 1229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) PNS, terdapat 760 (tujuh ratus enam puluh) orang PNS atau sekitar 61,84% yang telah memperoleh pengembangan kompetensi 20 JP atau lebih;
- Sejumlah 447 (empat ratus empat puluh tujuh) PNS atau sekitar 36,37% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan pengembangan kompetensi di bawah 20 JP;
- Sejumlah 22 (dua puluh dua) PNS atau sekitar 1,79% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI belum mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4s4qmy9LTG2so8Y>

#### 15. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	60,7%	61,7%	75%	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kuis dan Melayani Bangsa di Aplikasi SIRAJIN	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
	Pengumuman Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Kuis BerAKHLAK						
Penguatan nilai-nilai BerAKHLAK	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Sosialisasi Core BerAKHLAK	Panduan Value Sosialisasi Pedoman Panduan Core Value BerAKHLAK di Portal DPR	-	1	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pemberian Penghargaan Pemenang BerAKHLAK	bagi Kuis Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, terdapat penambahan kegiatan dalam indikator Indeks BerAKHLAK. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya minimum responden dalam kategori PNS level SMA. Namun begitu, kegiatan telah terlaksana pada 9 Oktober 2024 sebagai asistensi pengisian survei Core Value BerAKHLAK di Ruang Pansus C untuk 65 (enam puluh lima) orang PNS dengan level SMA. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti surat Plt. Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB tentang perpanjangan waktu pengisian Survei Budaya Kerja ASN 2024 Instansi Pemerintah Daerah WITA, WIT, dan Pemerintah Pusat. Melalui kegiatan tersebut, hasil perhitungan dari minimum responden dapat dilihat pada gambar berikut:

Update 26 September 2024						
Level	PNS JPT			PNS Non JPT		
	S3	S2/S3	S1/D4	D3/D1	SMA	Total
Pendidikan	5	76	120	41	72	314
Minimum Responden	4	42	56	16	24	142
Indeks BerAKHLAK	3	40	51	15	20	129
Employee Engagement						

  

Update 27 September 2024						
Level	PNS JPT			PNS Non JPT		
	S3	S2/S3	S1/D4	D3/D1	SMA	Total
Pendidikan	5	76	120	41	72	314
Minimum Responden	5	62	83	24	38	212
Indeks BerAKHLAK	5	62	87	31	34	219
Employee Engagement						

  

Update 28 September 2024						
Level	PNS JPT			PNS Non JPT		
	S3	S2/S3	S1/D4	D3/D1	SMA	Total
Pendidikan	5	76	120	41	72	314
Minimum Responden	10	148	181	56	56	451
Indeks BerAKHLAK	9	125	157	51	48	390
Employee Engagement						

  

Update 13 Oktober 2024						
Level	PNS JPT			PNS Non JPT		
	S2/S3	S2/S3	S1/D4	D3/D1	SMA	Total
Pendidikan	5	76	120	41	72	314
Minimum Responden	10	148	186	57	125	526
Indeks BerAKHLAK	9	125	160	52	108	454
Employee Engagement						

Gambar 1.14 Rekapitulasi data Responden *Core Value* BerAKHLAK Per 26 September 2024

Pada Triwulan IV, terdapat kendala dalam pelaksanaan survei dikarenakan adanya perubahan dalam jumlah dan minimum responden. Kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	KENDALA/HAMBATAN	TINDAK LANJUT
1.	Durasi Waktu Pelaksanaan Survei terlalu pendek mulai dari 22 – 28 September 2024	Kemenpan memberikan waktu tambahan karena masih banyak Kementerian/Lembaga yang belum memenuhi minimum responden yang telah ditetapkan
2.	Minimum responden belum terpenuhi pada 28 September 2024	Minimum responden akan terpenuhi untuk level SMA dan Diploma apabila dilakukan sosialisasi dan pengisian bersama
3.	Penambahan Waktu oleh Kemenpan RB untuk Pelaksanaan Survei Periode ke-2 pada 7-11 Oktober 2024	Pit mengundang perwakilan pegawai SMA untuk Asistensi Pengisian Survei Budaya Kerja ASN pada 9 Oktober 2024 di Pansus C.

Gambar 1.15 Kendala dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei BerAKHLAK

Terlepas dari kegiatan tambahan di atas, rencana aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV, yaitu Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK telah terlaksana pada tanggal 29 Agustus 2024 bersamaan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan dan Kepala Biro Sumber



Daya Manusia Aparatur mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI dalam pemberian penghargaan kepada pemenang Kuis BerAKHLAK.



Gambar 1.16 Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Kuis BerAKHLAK

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jr8Q2G75b6YsPDb>

**16. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:**

**a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	82,757	93,13	93,25	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Pedoman Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Standar Pelayanan	Tersusunnya kuesioner Reviu Standar Pelayanan	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pendampingan Pengisian Kuesioner yang diawali dengan Sosialisasi pengisian	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya kegiatan pengisian survei	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya input data kuesioner survei yang telah diisi	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pengolahan data kuesioner	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Reviu Standar Pelayanan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Implementasi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi	Tersusunnya Laporan Survei pada 13 (tiga belas) area	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	sebagai awalan penggunaan pedoman Survei Terintegrasi						
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Pembuatan Surat Edaran/Peraturan Sekretaris Jenderal atau Nota Dinas dari Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyelenggaraan Survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan						
	Tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	-	-	-	5	Rp.0	Telah terlaksana
Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran dalam Penilaian Kinerja	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana



Pada Triwulan IV, seluruh rencana aksi indikator Survei Kepuasan Masyarakat telah terlaksana seluruhnya. Rencana aksi penyelenggaraan survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan dengan indikator tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan rencana aksi Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM dengan indikator melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM, dan penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran dalam Penilaian Kinerja telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/cYq3pE5H78dbi9f>

**b. Indeks Pelayanan Publik**

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	4,31	4,40	4,51	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	Dokumen Surat Tugas/SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024	Hasil Rapat dan Pembagian Tugas Tim	1	-	-	-	Rp. 1.540.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersedianya Laporan FKP	-	1	-	-	Rp. 35.375.000	Telah terlaksana
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan SKM	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional	Tersedianya Laporan PEKPPP	-	-	1	-	Rp. 4.000.000	Telah terlaksana
Pelaporan PEKPPP ke Kementerian PANRB	Dokumen tanda terima pelaporan PEKPPP dari	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

	Kementerian PANRB						
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Tersedianya dokumen RTL	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	100%	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan RTL telah terlaksana. Rencana Tindak Lanjut disusun berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas Bagian Layanan Kesehatan DPR RI yang merupakan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Dalam Rencana Tindak Lanjut, terdapat 4 (empat) program/kegiatan tindak lanjut, yaitu membuat *email* dan *Whatsapp* khusus manajemen komplain yang telah dibuat pada tanggal 22 Mei 2024, penetapan waktu tunggu obat sebagai Indikator Mutu Prioritas Unit yang telah terlaksana pada tanggal 31 Mei 2024, sosialisasi melalui Portal DPR RI mengenai pendaftaran menggunakan aplikasi *mobile DIGIKES* yang kemudian telah dipublikasi pada tanggal 10 Juni 2024, dan sosialisasi standar pelayanan rawat jalan yang juga dipublikasi pada tanggal 10 Juni 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/i3gJm6DJ2rQXosH>



## LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN IV TAHUN 2024

### SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran pelaksanaan RB Tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada dasarnya, RB Tematik dituangkan ke dalam 5 (lima) tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, DPR RI memiliki intervensi yang penting untuk 5 (lima) tema RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon I (Pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam 5 (lima) tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.

#### A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN IV TAHUN 2024

##### 1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam tema pengentasan kemiskinan, Sekretariat Jenderal DPR RI mengangkat isu terkait nelayan Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi serius, terutama di tengah ambisi pemerintah untuk menggenjot ekonomi biru. Meskipun Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa, kesejahteraan nelayan tradisional seringkali dikesampingkan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di kalangan nelayan, antara lain, modal yang lemah, permainan harga jual ikan, keterbatasan daya serap industri pengelolaan ikan, dominasi armada tangkap nelayan asing, dan

keterbatasan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pemberdayaan nelayan skala kecil memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersampainya hasil kajian kepada Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Asistensi Pansus RUU Kelautan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar tentang sumber daya kelautan	Jumlah dokumen	-	2	-	-	Rp. 25.200.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan	Jumlah dokumen	-	1	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pendampingan dalam pembahasan Undang-Undang	Jumlah dokumen	-	-	1	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Perikanan	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana



Terukur								
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait kebijakan perikanan terukur	Laporan Kegiatan	2	-	-	-	Rp. 25.200.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait kebijakan perikanan terukur	Kegiatan Pengumpulan Data	1	-	-	-	Rp. 34.400.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Pemberdayaan Nelayan	Surat Keputusan Tim	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait pemberdayaan nelayan	Kegiatan Diskusi dengan Pakar	-	1	-	-	Rp. 12.600.000	SDM	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait pemberdayaan nelayan	Kegiatan Pengumpulan Data	-	1	-	-	Rp. 34.400.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan, baik dalam laporan akhir maupun dalam produk-produk periodik	Dokumen Kajian Sumber Daya Kelautan	-	-	1	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian hasil kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui platform data sharing terintegrasi (cloud)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Telah terlaksana

Pada tema Pengentassan Kemiskinan, RUU tentang Kelautan tidak di-carry over ke DPR periode 2024-2029. Namun, telah dilaksanakan penyusunan kajian terkait kelembagaan dalam RUU Kelautan (berupa *Foreign Legislation Analysis Coast Guard*

di berbagai negara, perbandingan kelembagaan dalam keselamatan dan penegakan hukum di laut, dan Kajian Tata Kelola Kelautan) serta Kompilasi DIM RUU Kelautan. Di samping itu, telah dilaksanakan pula penyusunan kajian terkait kemiskinan dan bantuan sosial dalam bentuk kajian periodik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/RgX4ibJyTtC2WY>

## 2. Peningkatan Investasi

Dalam tema peningkatan investasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa salah satu *intangible asset* perekonomian yang dapat menopang perekonomian nasional kedepan adalah sektor pariwisata. Namun, sektor pariwisata Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara sekawasan yang menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah rendahnya investasi sektor pariwisata. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya norma yang berkaitan dengan penguatan investasi di sektor pariwisata dalam naskah akademik dan RUU;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang determinan rendahnya investasi di sektor pariwisata baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersusunnya norma penguatan investasi di sektor pariwisata;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan naskah akademik dan RUU	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	1	1	-	Rp. 102.870.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian naskah akademik dan RUU kepada Alat	Jumlah AKD/Kem enterian/L	-	-	-	15	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana



Kelengkapan Dewan	embaga/Perguruan Tinggi							
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Dokumen Pemetaan Deteriman an	-	1	-	-	RP. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Kegiatan Diskusi Pakar	-	3	-	-	Rp. 19.350.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Dokumen Kajian terkait Penyelesaian Permasalahan Rendahny a Investasi	-	-	1	-	Rp. 100.424.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Notulensi/ Dokument asi Rapat	-	-	1	-	Rp.3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawas an	Telah terlaksana

Rencana aksi penyampaian naskah akademik dan RUU kepada Alat Kelengkapan Dewan telah terlaksana. Secara lebih spesifik, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang disampaikan kepada Komisi IV DPR RI. Bersamaan dengan itu, rencana aksi penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui *platform data sharing* terintegrasi (*cloud*) pun telah terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/keqMmYiXpMF5pek>

### 3. Pengendalian Inflasi

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh *Volatile Food* yang mayoritas dipenuhi dari impor (komoditas pangan dan hortikultura) akibat ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian dalam proses pembahasan anggaran dan pengawasan terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Dokumen Pemetaan Determinan	1	-	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Kegiatan Diskusi Pakar	-	2	-	-	Rp. 14.400.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi	Dokumen kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan	-	1	-	-	Rp. 150.930.000	Lain-lain	Telah terlaksana



	konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi							
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Notulensi/ Dokumentasi Rapat	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing terintegrasi (cloud)</i>	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/ Stakeholder terkait lainnya	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, rencana aksi penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui *platform data sharing terintegrasi (cloud)* telah terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/cxNX45rnWNmjQWA>

#### 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa capaian predikat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 621 (enam ratus dua puluh satu) Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPBE masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian hambatan pelaksanaan SPBE. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 18 (delapan belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder	Kegiatan Pengumpulan Data	2	-	-	-	Rp. 68.800.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian	Kegiatan Diskusi	-	1	-	-	Rp. 8.400.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait hambatan pelaksanaan SPBE	Dokumen Kajian terkait Hambatan Pelaksanaan SPBE	-	1	-	-	Rp. 4.500.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Notulensi/ Dokumentasi Rapat	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi	-	-	-	15	Rp. 135.00.000	Pengawasan	Telah terlaksana

Pada Triwulan IV, rencana aksi penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui *platform data sharing* terintegrasi (*cloud*) telah terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ANoPaji2i4DxKbZ>

## 5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam tema penggunaan produk dalam negeri, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa perlunya penggunaan anggaran belanja barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya



digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah terealisasinya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator dari sasaran tersebut adalah penggunaan produk dalam negeri sebesar 40%.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Surat Keputusan Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%	Laporan pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produksi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%	1	1	1	1	Rp. 9.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% telah dilaksanakan secara berkala. Realisasi transaksi belanja PDN per 11 November 2024 telah mencapai 77,09 %.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/RbfTjbSite8pRp6>

**LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, evaluasi internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) perlu dilakukan untuk memastikan *Roadmap* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, evaluator internal Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI. Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal RB dilakukan terhadap Evaluasi Pelaksanaan (*on-going*) dengan mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan), dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Dari 25 (dua puluh lima) indikator yang menjadi penilaian dalam evaluasi internal terdapat 1 (satu) indikator yaitu "Indeks Kualitas Kebijakan Publik" (IKK) yang dikecualikan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/13464/OT.05.02/11/2023 yang ditujukan kepada Kementerian PANRB, dan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/12387/OT.05.01/10/2023 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi LAN RI, serta Surat Tanggapan IKK dari LAN RI Nomor 3845/D.1/HKM.02.2. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator yaitu "Penataan Jabatan Fungsional" dan "Pengelolaan Kinerja ASN" yang telah menjadi bagian dari indikator "Indeks Sistem Merit". Dengan demikian jumlah indikator yang menjadi penilaian di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 22 (dua puluh dua) indikator.

Dalam pelaksanaan evaluasi internal, evaluator internal melibatkan lini kedua yaitu Bagian PKORB sebagai unit yang berkontribusi di dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dalam mendapatkan informasi mengenai evaluasi *on-going*.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Surat Nomor: B/498/PI.03/1/2025 pada tanggal 13 Januari 2025, hasil evaluasi internal RB di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:



**A. HASIL EVALUASI INTERNAL *ON-GOING* RB GENERAL TRIWULAN IV TAHUN 2024**

<b>I. KETERCAPAIAN TARGET RENCANA AKSI (<i>OUTPUT</i> DAN WAKTU) RB GENERAL</b>			
<b>NO.</b>	<b>AKSI</b>	<b>CATATAN (<i>OUTPUT</i>)</b>	<b>CATATAN (WAKTU)</b>
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.

	Masyarakat (LAPOR)		
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
16.	Penguatan Sistem Merit:	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.



	Indeks Sistem Merit		
17.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK	Indikator <i>output</i> pada Rencana Aksi "Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK" yaitu "Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK" yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan IV, maju ke Triwulan III. Pengumuman pemenang dimajukan dari rencana seharusnya karena bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2024.	Indikator <i>output</i> pada Rencana Aksi "Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAKHLAK" yaitu "Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK" yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan IV, maju ke Triwulan III. Pengumuman pemenang dimajukan dari rencana seharusnya karena bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2024.
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh rencana aksi telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II.	Seluruh aksi telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II.
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan IV.	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan IV.
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh kegiatan berdasarkan rencana aksi telah diselesaikan pada triwulan-triwulan sebelumnya.	Seluruh kegiatan berdasarkan rencana aksi telah diselesaikan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

II. KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB		
NO.	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan

		komponen aksinya, dengan melampirkan draft kajian penyederhanaan birokrasi.
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.



14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan IV telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya.
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Indikator <i>output</i> pada Rencana Aksi "Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK" yaitu "Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK" yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan IV, terealisasi lebih awal di Triwulan III. Pengumuman pemenang dimajukan dari rencana seharusnya karena bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2024.
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh rencana aksi telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II.
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh indikator <i>output</i> tercapai, seperti tersusunnya laporan SKM, rekomendasi hasil evaluasi, dan penyampaian laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan ekspektasi rencana aksi RB.
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Laporan PEKPPP Mandiri Instansional telah disusun sesuai dengan rencana aksi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan relevan dengan ekspektasi rencana aksi RB.
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Kegiatan yang dilakukan telah memenuhi ekpektasi rencana aksi RB. Tercapainya <i>output</i> menunjukkan efektivitas kegiatan dalam mendukung implementasi arsitektur SPBE sesuai tujuan Reformasi Birokrasi.
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan IV, Seluruh kegiatan berdasarkan rencana aksi telah diselesaikan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

III. KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB GENERAL		
NO.	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi, namun pelaksanaan implementasi penyederhanaan birokrasi pada Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan karena adanya penambahan struktur (penataan struktur organisasi) berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 dengan keputusan penambahan Alat Kelengkapan Dewan. Sehingga telah disusun surat yang dikirimkan ke Kementerian PANRB terkait kondisi yang dihadapi Sekretariat Jenderal DPR RI.
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.



9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan IV telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi.
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Indikator <i>output</i> pada Rencana Aksi "Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK" yaitu "Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK" yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan IV, telah selesai dilaksanakan di Triwulan III. Pengumuman pemenang dimajukan dari rencana seharusnya karena bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2024.
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektor: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Seluruh rencana aksi telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II.

19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Manajemen dalam pelaksanaan RB telah berjalan dengan baik karena pelaksanaan aksi tetap tercapai sesuai dengan tujuan meskipun terdapat revisi pelaksanaan aksi dari Triwulan III ke Triwulan IV. Hal ini mencerminkan fleksibilitas manajemen dalam menyesuaikan perubahan sambil memastikan <i>output</i> tetap tercapai.
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional telah mencapai tahap akhir dengan laporan selesai yang disusun dan telah ditandatangani. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mampu menyelesaikan komponen aksi sesuai target waktu.
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Seluruh komponen aksi terkait Tingkat implementasi arsitektur SPBE telah dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini mencerminkan perencanaan dan eksekusi manajemen yang baik dalam mendukung pelaksanaan RB.
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh kegiatan berdasarkan rencana aksi telah diselesaikan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

#### B. HASIL EVALUASI INTERNAL *ON-GOING* RB TEMATIK TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO.	AKSI	KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI ( <i>OUTPUT</i> DAN WAKTU)	KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB	KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB
1.	Pengentasan Kemiskinan	Pelaksanaan aksi telah memenuhi target <i>output</i> sesuai indikator yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan telah relevan dengan konteks kebutuhan rencana aksi.	Kegiatan penyusunan kajian sesuai dengan ekspektasi rencana aksi RB, didukung oleh data pendukung yang lengkap dan distribusi hasil melalui platform terintegrasi (SIMFONI).	Penggunaan platform digital seperti SIMFONI untuk mendistribusikan kajian menunjukkan manajemen yang efisien dan transparan dalam pelaksanaan aksi.  Bukti daftar penerima kajian menegaskan akuntabilitas manajemen



				dalam memastikan seluruh <i>stakeholder</i> yang relevan menerima kajian.
2.	Realisasi Investasi	Pelaksanaan aksi telah mencapai target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan yang ditentukan, dengan distribusi yang terdokumentasi melalui platform digital untuk efisiensi.	Kegiatan memenuhi ekspektasi rencana aksi RB, dengan fokus pada penyampaian dokumen yang relevan dan akurat kepada pihak terkait.	<p>Penggunaan SIMFONI untuk mendistribusikan kajian dan dokumen mendukung efisiensi dan transparansi manajemen, memastikan aksesibilitas seluruh <i>stakeholder</i>.</p> <p>Bukti penyampaian kepada Komisi VII DPR RI dan daftar penerima melalui SIMFONI mencerminkan akuntabilitas manajemen dalam memastikan dokumen diterima oleh pihak yang tepat sesuai sasaran.</p>
3.	Digitalisasi Pemerintahan	Pelaksanaan aksi telah mencapai target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan yang ditentukan, dengan distribusi yang terdokumentasi melalui platform digital untuk efisiensi.	Kegiatan telah dilakukan sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan penyusunan dan penyampaian kajian yang tepat waktu dan relevan.	Penggunaan SIMFONI mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam mendistribusikan kajian ke <i>stakeholder</i> serta bukti daftar penerima kajian mendukung akuntabilitas manajemen pelaksanaan RB.
4.	Penggunaan Produk	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan	Manajemen berhasil

	Dalam Negeri (PDN)	tercapai dengan hasil yang signifikan dan melampaui target.	sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang melebihi target.	memastikan belanja produk dalam negeri melebihi target, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.
5.	Pengendalian Inflasi	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai sesuai rencana aksi.	Kegiatan telah memenuhi ekspektasi rencana aksi RB dengan penyusunan dan penyampaian dokumen yang relevan dan tepat waktu.	Penggunaan SIMFONI mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam mendistribusikan kajian ke <i>stakeholder</i> serta bukti daftar penerima kajian mendukung akuntabilitas manajemen pelaksanaan RB.

### C. TINDAK LANJUT ATAS HASIL REKOMENDASI LAPORAN PERIODE SEBELUMNYA

NO.	AKSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Agar dapat melampirkan laporan progress ketercapaian <i>output</i> Triwulan III yang sudah diformalkan (ditandatangani).	Telah melampirkan laporan progress ketercapaian <i>output</i> yang sudah diformalkan (ditandatangani).
2.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	1. Melampirkan penyesuaian rencana aksi pada folder yang telah disiapkan oleh Bagian PKORB; 2. Melampirkan bukti dukung ke folder yang telah disiapkan oleh Bagian PKORB.	Telah melampirkan bukti dukung dan laporan progress ketercapaian <i>output</i> yang sudah diformalkan.
3.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	1. Memformalkan Rencana Aksi terbaru; 2. Memformalkan Laporan Progress Rencana Aksi Triwulan III; 3. Melampirkan bukti dukung ke folder yang	1. Belum memformalkan Rencana Aksi terbaru ditandatangani; 2. Belum memformalkan



		telah disiapkan oleh Bagian PKORB.	Laporan Progress Rencana Aksi Triwulan III.
--	--	------------------------------------	---

#### D. REKOMENDASI EVALUASI RB ON GOING TRIWULAN IV

Berdasarkan catatan pelaksanaan Rencana Aksi RB Sekretariat Jenderal DPR RI di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Rincian penjelasan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	AKSI	REKOMENDASI
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	-
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Realisasi indikator <i>output</i> tidak sesuai dengan target dalam rencana aksi. Oleh karena itu, agar dapat menyelaraskan antara satuan <i>output</i> dan indikator <i>output</i> dalam dokumen rencana aksi.
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	-
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar melengkapi substansi laporan sehingga dapat menjawab ekspektasi rencana aksi;</li> <li>2. Agar setiap eviden yang dilampirkan dapat diberikan penjelasan waktu pelaksanaan kegiatan, diberikan tanggal pada akhir laporan, dan diformalkan.</li> </ol>
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	-
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	-
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	-

10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	-
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	-
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	-
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	-
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	-
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	-
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	-
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Apabila terdapat revisi rencana aksi dan laporan progress, agar dapat memperhatikan keabsahan dua dokumen tersebut.
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	-
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	-